



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 (AUDITED)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA KPU RI PERIODE 2022-2027

Hasyim Asy'ari

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Yulianto Sudrajat

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan,
Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Wakil Ketua Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan
Penelitian dan Pengembangan



August Mellaz

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
Wakil Ketua Divisi
Teknis Penyelenggaraan



Betty Epsilon Idroos

Ketua Divisi Data dan Informasi
Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat



Parsadaan Harahap

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan
Penelitian dan Pengembangan
Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan,
Umum, Rumah Tangga dan Logistik



Idham Holik

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan



Mochammad Afifuddin

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
Wakil Ketua Divisi Data dan Informasi



ARIEF BUDIMAN
ANGGOTA KPU RI



ILHAM SAPUTRA
KETUA KPU RI



HASYIM ASYARI
ANGGOTA KPU RI



EVI NOVIDA GINTING MANIK
ANGGOTA KPU RI



PRAMONO UBAID TANTHOWI
ANGGOTA KPU RI



I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI
ANGGOTA KPU RI



VIRYAN
ANGGOTA KPU RI

**KETUA & ANGGOTA KPU RI
PERIODE 2017-2022**



Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 25 April 2022
Sekretaris Jenderal KPU



Bernad Dermawan Sutrisno
NIP. 19741005 199301 1 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum tingkat Kementerian/Lembaga selaku UAPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 April 2022

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia**



Ilham Saputra



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Jalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta

Telp. 021 31937223

Email:persuratan@kpu.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2021 AUDITED**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 *Audited*, berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 26 April 2022

Inspektur Utama

Nanang Priyatna



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum *Audited* Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp59.241.989.024,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.080.639.905.188,- atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.166.767.417.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.182.369.841.549,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp85.016.922.825,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp2.073.253.394.400,-; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp12.228.903.307,-; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp11.870.621.017,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.182.369.841.549,- yang terdiri dari Kewajiban sebesar Rp6.980.909.715,- dan Ekuitas sebesar Rp2.175.883.823.430,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.320.634.507,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar 3.277.887.982.185,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.275.567.347.678,-). Kegiatan Non Operasional Surplus Rp39.296.928.926,- dan Pos Luar Biasa surplus/defisit Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.236.270.418.752,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp4.448.060.305.957,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(3.236.270.418.752,-) ditambah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp1.066.830.203.354,-) ditambah transaksi lain-lain sebesar (Rp1.076.711.697.564,-) dan transaksi antar entitas Rp2.030.929.081.921,-sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.175.883.823.430,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal per 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021				2020
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	59.241.989.024	59.241.989.024	-	86.141.015.299
PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	59.241.989.024	59.241.989.024	0	86.141.015.299
BELANJA					
Belanja Pegawai	1.327.248.358.000	1.313.506.909.083	(13.741.448.917)	99	1.236.985.942.677
Belanja Barang	1.815.838.635.000	1.744.470.737.877	(71.367.897.123)	96	9.888.791.995.705
Belanja Modal	23.680.424.000	22.662.258.228	(1.018.165.772)	96	80.200.105.740
Belanja Pembayaran Kewajiban	0	0	-	0	0
Belanja Subsidi	0	0	-	0	0
Belanja Hibah	0	0	-	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-	0	0
Belanja Lain-lain	0	0	-	0	0
JUMLAH BELANJA	3.166.767.417.000	3.080.639.905.188	(86.127.511.812)	97	11.205.978.044.122



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NERACA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	72.565.856	411.849.034
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	31.995.382.383	2.179.138.992.023
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	10.005.958.960	6.383.099.460
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.4	2.660.957.881	1.536.435.997
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan	C.5	(29.510.411)	(9.923.898)
Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.6	2.631.447.470	1.526.512.099
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.7	40.311.568.156	76.231.369.547
JUMLAH ASET LANCAR		85.016.922.825	2.263.691.822.163
ASET TETAP			
Tanah	C.8	1.113.746.138.933	1.060.182.468.203
Peralatan dan Mesin	C.9	1.550.201.028.243	1.569.738.727.001
Gedung dan Bangunan	C.10	660.475.742.640	638.700.199.795
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	1.714.761.860	1.767.639.960
Aset Tetap Lainnya	C.12	6.573.128.755	5.298.537.063
Akumulasi Penyusutan	C.13	(1.259.457.406.031)	(1.106.135.549.832)
JUMLAH ASET TETAP		2.073.253.394.400	2.169.552.022.190
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.14	12.501.060.041	12.129.845.056
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.15	(272.156.734)	(60.101.904)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	C.16	12.228.903.307	12.069.743.152
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		12.228.903.307	12.069.743.152
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.17	25.378.663.282	23.993.925.556
Aset Lain-lain	C.18	121.745.521.856	97.520.149.436
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(135.253.564.121)	(104.887.150.250)
JUMLAH ASET LAINNYA		11.870.621.017	16.626.924.742
JUMLAH ASET		2.182.369.841.549	4.461.940.512.247
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	6.257.432.506	7.454.422.648
Pendapatan Diterima Dimuka	C.21	20.218.500	
Uang Muka dari KPPN	C.22	72.565.856	411.849.034
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.23	135.801.257	6.013.934.608
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		6.486.018.119	13.880.206.290
JUMLAH KEWAJIBAN		6.486.018.119	13.880.206.290
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.24	2.175.883.823.430	4.448.060.305.957
JUMLAH EKUITAS		2.175.883.823.430	4.448.060.305.957
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.182.369.841.549	4.461.940.512.247



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Desember 2021 dan 2020**
Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1		
Pendapatan PPh		0	0
Pendapatan PPnBM		0	0
PNBP Lainnya		2.320.634.507	10.238.383.774
JUMLAH PENDAPATAN		2.320.634.507	10.238.383.774
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.317.209.552.624	1.237.228.593.366
Beban Persediaan	D.3	48.277.495.569	418.083.432.972
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.325.004.218.800	8.592.824.210.812
Beban Pemeliharaan	D.5	76.873.118.479	76.561.562.491
Beban Perjalanan Dinas	D.6	304.260.546.445	895.046.344.343
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.847.783.423	1.285.181.650
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	204.183.625.502	212.600.638.449
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	231.641.343	577.830
Beban Lain-Lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		3.277.887.982.185	11.433.630.541.913
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.275.567.347.678)	(11.423.392.158.139)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		15.010.856.965	57.727.649.714
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		34.334.201.800	62.640.786.590
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		19.323.344.835	4.913.136.876
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		24.286.071.961	94.445.142.214
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		35.917.642.220	100.216.111.127
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.631.570.259	5.770.968.913
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		39.296.928.926	152.172.791.928
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.236.270.418.752)	(11.271.219.366.211)
Pos Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		(3.236.270.418.752)	(11.271.219.366.211)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(AUDITED)

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4.448.060.305.957	2.712.805.135.661	1.735.255.170.296	63,965
SURPLUS/DEFISIT LO	(3.236.270.418.752)	(11.271.219.366.211)	8.034.948.947.459	(71,287)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1.066.830.203.354)	15.087.639.114	(1.081.917.842.468)	(7.170,889)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	
Koreksi Nilai Persediaan	1.777.071.052	1.286.684.506	490.376.546	38,112
Koreksi atas Reklasifikasi	(3.467.436.283)	(1.167.917.557)	(2.299.518.726)	196,891
Selisih Revaluasi Aset	0	515.034.214	(515.034.214)	(100)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	11.571.859.441	14.231.278.762	(2.659.419.321)	(18,687)
lain - lain	(1.076.711.697.564)	222.559.189	(1.076.934.256.753)	(483.886,674)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.030.924.139.579	12.991.386.897.393	(10.960.462.757.814)	(84,367)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2.272.176.482.527)	1.735.255.170.296	(4.007.431.652.823)	(230,942)
EKUITAS AKHIR	2.175.883.823.430	4.448.060.305.957	(2.272.176.482.527)	(51,082)



**BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**